

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Menurut UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 2 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu asas Pemerintahan Daerah yang tercantum dalam UU No 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 7 adalah Desentralisasi. Asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi antara lain bertujuan meringankan beban pekerjaan pemerintah pusat. Dengan desentralisasi tugas dan pekerjaan dialihkan kepada daerah. Pemerintah pusat dengan demikian dapat memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau Negara secara keseluruhan.

Sesuai dengan wewenang yang sudah diberikan kepada pemerintah daerah, maka pemerintah memiliki tugas penting untuk membantu meningkatkan otonomi daerahnya masing-masing dengan tetap sesuai ketentuan dan prinsip Negara

Republik Indonesia, sehingga dengan begitu otonomi daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, keamanan, dan kenyamanan, serta meningkatkan peran masyarakat untuk terus mengembangkan kreatifitas dan melindungi aset-aset yang dimiliki oleh daerah baik dalam bidang pariwisata ataupun bidang lain. Untuk dapat menjalankan peningkatan otonomi daerah, diperlukan adanya sumber-sumber yang cukup memadai. Salah satu Sumber penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Untuk Pajak dan retribusi daerah diatut dalam UU No 28 tahun 2009 yang di dalamnya mengatur tentang jenis-jenis pajak yang memberikan kontribusi yang cukup besar seperti pajak hiburan, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak reklame, pajak hotel dan restoran serta pajak lainnya.

Kota Surabaya adalah salah satu kota yang cukup berkembang dalam bidang pembangunan. Mulai dari pembangunan yang diperuntukkan untuk kepentingan umum maupun kepentingan khusus. Hotel dan Restoran menjadi contoh objek yang dibangun cukup banyak di kota Surabaya oleh beberapa pengusaha untuk kepentingan ekonomi yaitu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Seiring berkembangnya globalisasi yang serba cepat dan mudah, hal ini menjadi objek yang bermanfaat juga bagi masyarakat kota Surabaya dalam kebutuhan atau pemanfaatan fasilitas dari hotel dan restoran. Berdasarkan

fenomena yang terjadi adanya pertumbuhan hotel dan restoran ini, tidak hanya berguna untuk pengusaha dan pengguna fasilitas hotel dan restoran saja, akan tetapi juga berguna bagi perolehan pendapatan bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya dalam bentuk kontribusi atau peranan pajak hotel dan pajak restoran.

Dalam peraturan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran merupakan kontribusi yang cukup mempengaruhi peningkatan jumlah penerimaan Pajak Asli Daerah Kota Surabaya. Langkah awal untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Asli Daerah yang signifikan pemerintah daerah kota Surabaya perlu menetapkan target-target yang harus dicapai pertahunnya. Dalam mencapai target-target yang sudah ditetapkan tidak menutup kemungkinan adanya hambatan-hambatan dalam perolehan penerimaan dari pajak hotel dan restoran yang menyebabkan tidak terpenuhi target. Hal ini bahkan terjadi pada tahun terakhir, pajak hotel belum mencapai target. Pada tahun

2015 pajak hotel ditarget sebesar Rp200 milyar namun yang terealisasi sebesar Rp187 milyar. Berbeda dengan pajak hotel, tahun 2015 terdapat peningkatan dari pajak restoran yang mampu menembus Rp260 milyar. Besarnya kontribusi yang terealisasi dapat lebih membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (sumber data: Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya).

Pencapaian atas pemenuhan target bisa terealisasi apabila adanya program-program yang tepat dalam upaya meningkatkan Penerimaan Pajak Asli Daerah Kota Surabaya yang bermanfaat ke depannya bagi pemerintah dalam usaha perolehan pendapatan daerah. Selain itu, perlu adanya rasa pertanggung jawaban terhadap kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak. Hal inilah yang menjadikan penulis mencoba meneliti masalah tersebut dan menuliskannya dengan judul **“PERANAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA”**.

1.2 Tujuan Studi Lapangan

Tujuan yang diharapkan penulis dalam penyusunan tugas akhir ini yakni untuk menambah ilmu yang belum diperoleh dalam perkuliahan, serta mengetahui sejauh mana pemahaman terhadap materi pajak yang sudah diterima, secara khusus tentang pajak hotel dan restoran. Selain itu lewat penelitian ini, penulis ingin mengetahui permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pajak hotel dan pajak restoran yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya, serta cara mengatasi masalah yang terjadi terkait perananan dan kontribusi pajak hotel dan restoran.

1.3 Manfaat Studi Lapang

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penyusunan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak seperti bagi peserta Penulis, Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya dan Penulis lain. Pertama, bagi Penulis adalah diharapkan melalui penelitian ini dapat menerima informasi dan wawasan tentang kontribusi pajak hotel dan restoran oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya. Kedua, bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya diharapkan dapat memberikan referensi tentang pengambilan keputusan yang berkaitan dengan upaya peningkatan Penerimaan Pajak Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Ketiga, bagi Penulis lain adalah agar dapat memberikan informasi-informasi yang mungkin diperlukan dalam membahas permasalahan yang sama yang dideskripsikan pada Laporan Tugas Akhir ini.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Untuk menghindari adanya pembahasan masalah yang cukup luas maka perlu ditentukan ruang lingkup masalah yang diteliti. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di bahas ruang lingkup masalah yang akan di bahas adalah informasi yang berkaitan dengan peranan pajak hotel dan pajak restoran terhadap Penerimaan Pajak Asli Daerah Kota Surabaya.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. *Observasi* adalah pengamatan secara langsung akan suatu

permasalahan atau fenomena yang terjadi pada saat pelaksanaan studi lapang. Dalam pelaksanaan studi lapang ini yang menjadi objeknya adalah peranan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.

Wawancara adalah proses pengambilan informasi yang dilakukan oleh penanya dan narasumber tentang objek atau subjek tertentu. Wawancara ini dilakukan antara peneliti dengan petugas yang ada di kantor Dinas Pendapatan Daerah Surabaya. *Dokumentasi* adalah bentuk informasi yang diterima dari berbagai sumber baik dari suatu badan maupun instansi tertentu, yang dapat berupa kumpulan data atau dokumen-dokumen penting lainnya. Informasi yang dapat diterima melalui metode ini adalah data target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran hingga total penerimaan pajak asli daerah kota Surabaya. Data yang diterima dari Dinas Pendapatan Daerah.

